

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Dalam tahapan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018, RKPD tahun 2018 merupakan fase akhir pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur. Segala kebijakan yang dirumuskan pada RKPD tahun 2018 ini akan menjadi kunci penilaian terhadap capaian perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu dalam perumusan prioritas, strategi dan arah kebijakan RKPD tahun 2018 perlu melihat keterkaitan antara pelaksanaan awal dan akhir dari perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2018 akan memberikan hasil yang positif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan akhir perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Disamping itu, perumusan prioritas, strategi dan arah kebijakan RKPD tahun 2018 juga harus memperhatikan dinamika perkembangan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kalimantan Timur. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan.

Bab ini membahas tentang prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dan Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan,
2. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD,
3. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah,
4. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

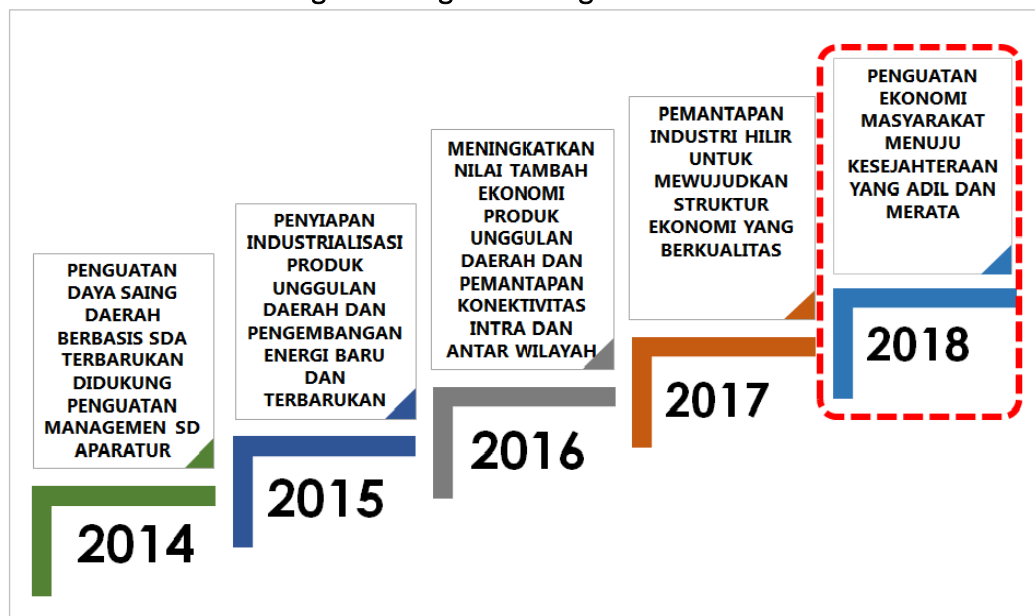
4.1.1. Integrasi RKPD Tahun 2018 dengan RPJMD

Sejalan dengan kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan upaya pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dalam mewujudkan Visi Kaltim 2013-2018 yaitu “Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan”. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur, tema indikatif pembangunan tahunan telah dirumuskan dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan akhir pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah tema indikatif yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yaitu “Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata”.

Gambar 4.1.

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018



Namun tema pembangunan tersebut di formulasi dengan memperhatikan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Dari hasil formulasi tersebut tema pembangunan Tahun 2018 selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 berdasarkan fokus tema pembangunan sebagai berikut :

1. **Penguatan Ekonomi Masyarakat** : hal ini dimaknai dengan upaya membangun ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Fokus penguatan ekonomi masyarakat ini sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan terdahulu

pada Bab II bahwa kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Sasaran fokus tema ini adalah menumbuhkan perekonomian secara inklusif dan berkesinambungan, dengan fokus perhatian terletak pada sisi penawaran yang terkait produktifitas ekonomi. Strategi yang di tempuh adalah memanfaatkan sumber daya pembangunan seperti penduduk produktif dengan perpaduan investasi. Kedua sektor merupakan komplementer, yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antar sektor pertanian dan industri pengolahan yang merupakan sektor dominan pembentuk PDRB Kalimantan Timur. Pengembangan sektor kependudukan (pengembangan SDM) dan investasi disinergiskan dengan permasalahan yang dihadapi pada sektor-sektor pertanian dan industri pengolahan .

2. **Kesejahteraan Masyarakat** : dimaknai dengan indikasi tingkat hidup masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Sasaran fokus tema ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari beberapa aspek yang merupakan permasalahan kesejahteraan di Kalimantan Timur yaitu :

- **Kemiskinan** : masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok yang selalu menjadi prioritas pemerintah Kalimantan Timur dan menjadi agenda rutin dalam rencana pembangunan Kalimantan Timur. Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan yang cenderung menurun secara melambat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu terus dioptimalkan. Hal ini tergambar dari belum meratanya pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Dalam RKPD 2018 ini pemerintah Kalimantan Timur terus berupaya mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti **program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian** dengan melibatkan semua pelaku pembangunan, tidak cukup hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
- **Kesehatan** : produktivitas kegiatan perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat produktifitas penduduk daerah itu sendiri. Untuk itu kebijakan pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur pada RKPD 2018 diarahkan pada berbagai program kesehatan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses ; pelayanan publik, seperti Puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan angka tingkat kesakitan masyarakat, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan angka harapan hidup. Upaya lain yang dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin ; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

- **Pendidikan** : Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat masyarakat Kalimantan Timur memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia Kalimantan Timur seutuhnya. Dalam RKPD tahun 2018 pembangunan pendidikan Kalimantan Timur masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti yang dirumuskan pada Bab II, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup : **Pemerataan dan perluasan akses, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan Peningkatan pembiayaan.** Beberapa indikator yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain: HLS (Harapan Lama Sekolah), Tingkat Pendidikan, APS (Angka Partisipasi Sekolah), APK (Angka Partisipasi Kasar), dan APM (Angka Partisipasi Murni). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.
- **Ketenagakerjaan** : merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah Kalimantan Timur. Masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah Kalimantan Timur antara lain **tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.** Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antar lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat

pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.

3. **Kesejahteraan Yang Adil dan Merata** : Adil dimaknai dengan mengurangi kesenjangan antar golongan ekonomi dan strata pendapatan dalam masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan di atas landasan yang kukuh dan berkesinambungan. Pemerataan dimaknai dengan masyarakat dari berbagai golongan pendapatan dan wilayah mendapatkan pelayanan pembangunan yang sama. Pembangunan dan hasil-hasilnya diarahkan untuk makin tersebarunya pembangunan prasarana dan sarana fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan berbagai barang publik lainnya, dimana pembangunannya menyebar ke pelosok-pelosok wilayah terpencil.

RKPD tahun 2018 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMD 2013—2018 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tampak jelas bahwa pembangunan pada RKPD tahun 2018 adalah sebagai bagian dari tahapan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, dengan strategi pembangunan melalui percepatan pencapaian target tujuan pembangunan antara lain :

- **Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Kalimantan Timur**

Pendidikan memegang peranan kunci dalam pembangunan sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan daerah. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Pembangunan Sumber daya manusia dilakukan melalui upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun informal, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas dalam kemampuan tetapi juga mempunyai akhlak dan mental yang tangguh.

Provinsi Kalimantan Timur, dalam pencapaian pendidikan, telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik sebagaimana terwujud dalam pemberian beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Keberhasilan upaya meningkatkan derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka melek huruf. Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2010 pemerintah telah mencanangkan program Wajib belajar 12 tahun. Program ini harus terus dilanjutkan dan dituntaskan agar anak-anak usia sekolah memperoleh haknya dalam pendidikan sehingga lebih berdaya saing. Pengembangan kurikulum pendidikan

berbasis penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja. Upaya penting berikutnya untuk meningkatkan pendidikan adalah dengan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berkualitas dan lengkap di semua daerah, terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. **Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia**, dengan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia **sebesar 75,70**;
2. **Meningkatnya harapan lama sekolah**, dengan capaian indikator angka harapan lama sekolah **sebesar 14,00 tahun**;
3. **Meningkatnya rata-rata lama sekolah**, dengan capaian indikator rata-rata lama sekolah **menjadi 12 tahun**; dan
4. **Meningkatnya angka harapan hidup**, dengan capaian angka harapan hidup **sebesar 74,00 tahun**.

• **Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat yang merata merupakan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kesejahteraan mempunyai arti terpenuhinya segala aspek kebutuhan hidup manusia, jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat serta kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi daerah yang dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana. Adapun kebutuhan rohani ditunjukkan oleh kondisi masyarakat yang hidup dengan nyaman, tenang, damai, saling memahami, dan mampu bertoleransi dengan baik dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing. Dengan pemahaman tersebut maka akan terwujud masyarakat yang sejahtera dan secara tidak langsung menunjukkan keadaan perekonomian masyarakat yang baik, derajat kesehatan yang tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Dengan masyarakat sejahtera, terjamin hak-haknya, mempunyai kesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta kebutuhan hidup yang layak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat. Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai melalui beberapa sektor, seperti; sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:

1. **Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 6,00 persen**;

2. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 7,00 persen;
 3. Meningkatnya standar hidup layak, dengan capaian paritas daya beli sebesar 11.800 ribu per kapita/tahun;
 4. Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat tingkat inflasi sebesar $0,5 \pm 1$ persen dengan Indeks Tendensi Konsumen sebesar 106,8 ; dan
 5. Menurunnya Indeks Gini, dengan capaian indeks gini sebesar 0,32.
- Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya, melalui: pengurangan emisi GRK, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, penggunaan sumber daya secara lebih efisien, memberikan peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata, serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi. Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan timur dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi yang berkelanjutan dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan dan hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar $0,5 \pm 1$ persen (LPE migas), 1 ± 1 persen (LPE non migas), dan 4 ± 1 persen (LPE non migas dan non batubara);
 2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, dengan capaian indikator kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 10,00 persen dan didukung pula dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 5 ± 1 persen;
 3. Tercapainya swasembada pangan, dengan capaian indikator rasio pemenuhan beras sebesar 85,00 persen; dan
 4. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan, dengan capaian indikator bauran energi baru terbarukan sebesar 3,00 persen.
- Tujuan 4 : Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi barang dan penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, “Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 7,00”.

- **Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah. Sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,00 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 85 (sangat baik); dan
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 80,00 (A) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”.

- **Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan lingkungannya. Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan

potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran **meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan**, dengan capaian indikator kinerja:

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 82,00; dan
2. Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca , dengan indikator Intensitas Emisi sebesar 1.650 ton CO₂/US \$ juta PDRB.

Strategi dan arah kebijakan yang telah disusun sesuai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018
Dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

RPJMD 2013-2018					RKPD 2018	
VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN					TEMA: PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA	
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (SATUAN)	TARGET 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2018
Misi I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	75,7	Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	Peningkatan kompetensi guru
		Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14		Peningkatan kesempatan belajar masyarakat
		Meningkatnya rata- rata lama sekolah	Angka rata-rata sekolah (tahun)	12		
		Meningkatnya angka harapan hidup	Angka harapan hidup (tahun)	74	Strategi 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan	Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	6	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	7	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	Peningkatan Kualitas tenaga kerja
		Meningkatnya Standar Hidup Layak	Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)	11,800	Strategi 5 : Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi (%)	4±1		Penguatan kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis
			Indeks Tendensi Konsumen	106,8		
		Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	0,32		Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa antar pusat kegiatan nasional (PKN)

RPJMD 2013-2018					RKPD 2018	
VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN					TEMA: PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA	
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (SATUAN)	TARGET 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2018
	Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	0,5±1	Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi	Peningkatan investasi daerah
			Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	1±1		Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
			Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	4±1		Peningkatan ekspor produk olahan
		Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Share sektor pertanian dalam arti luas (%)	10	Strategi 7: Pengembangan agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian)	Pembangunan prasarana jalan dan prasarana transportasi untuk mendukung kawasan strategis provinsi (KSP) Maloy dan KSP lain
			Laju pertumbuhan ekonomi Sektor pertanian dalam arti luas	5,00±1		Peningkatan ekspor produk unggulan daerah
		Tercapainya swasembada pangan	Rasio pemenuhan beras (%)	85	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	Penguatan mata rantai kawasan kawasan agribisnis
						Peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura
		Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan (%)	3	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan	Peningkatan infrastruktur pertanian
						Peningkatan produktivitas pertanian
						Peningkatan rasio elektrifikasi
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata	Tujuan 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	7	Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan
						Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman dan perbatasan
						Peningkatan kapasitas air baku dan air minum
						Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
						Pengendalian banjir dan daya rusak air
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	6	Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerja aparatur
			Opini BPK	WTP		
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85		
			Predikat	(sgt baik)		
		Meningkatnya	Predikat	80,00 (A)		

RPJMD 2013-2018					RKPD 2018	
VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN					TEMA: PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA	
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (SATUAN)	TARGET 2018	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2018
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	kapasitas dan akuntabilitas kinerja	Akuntabilitas Kinerja	Sangat Tinggi (3-4)		
			Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	82	Strategi 12 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan
		Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Intensitas Emisi (ton CO ₂ /PDRB US \$ juta)	1,65		Penurunan emisi gas rumah kaca

4.1.2. Integrasi RKPD Tahun 2018 dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sesuai dengan prinsip Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa antara Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Nasional agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menginternalisasikan tema pembangunan, tujuan, dan sasaran prioritas pembangunan nasional.

Gambar 4.2
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran RKP Tahun 2018
dengan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2018



Selanjutnya sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu : **Dimensi Pembangunan Manusia**; **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** ; dan **Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan** tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang diselaraskan sebagai berikut:

1. **Dimensi Pembangunan Manusia**, yang terdiri dari: revolusi mental; pembangunan pendidikan; pembangunan kesehatan; dan pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk mendukung agenda Nasional pada Dimensi Pembangunan Manusia, maka pada RKPD Kalimantan Timur Tahun 2018 dituangkan dalam sasaran pembangunan sektoral sebagai berikut :
 - a) **Revolusi Mental**, dalam upaya mempersiapkan calon pemimpin masa depan serta menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta memiliki Karakter Bangsa Indonesia yang diharapkan sesuai cita-cita Pendiri Bangsa yang merupakan keinginan Presiden Jokowi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan diklat Revolusi Mental bagi pejabat aparatur sipil negara di lingkungan

Provinsi Kalimantan Timur. Sampai tahun 2016, diklat revolusi mental telah dilakukan sebanyak 4 angkatan dengan masing-masing angkatan sebanyak 70 orang. Dua angkatan dilaksanakan di Kampus Revolusi Mental-Subang, dan dua angkatan lagi dilaksanakan di Diklat SDM Kalimantan Timur. Diklat ini akan terus dilaksanakan sehingga seluruh pejabat struktural di Kalimantan Timur yang berjumlah 1.124 orang telah mengikutinya.

- b) **Harapan Lama Sekolah**, merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang baik formal maupun nonformal dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah. Harapan lama sekolah penduduk (usia 7 tahun keatas) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 13,5 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah pada anak umur tertentu pada tahun 2016 tersebut selama 13,5 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi tahun pertama atau semester 2.

Rata-rata Lama Sekolah: Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas yang menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 mencapai 9,24 tahun, artinya rata-rata penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Prov. Kaltim pernah menempuh pendidikan selama 9,24 tahun atau kira-kira setara bersekolah hingga kelas 1 SMA.

- c) **Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan** : Kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan dibidang ini secara mendasar.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kualitas kesehatan masyarakat yang baik akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian – capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi

faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur juga harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T) dapat terjangkau pelayanan kesehatan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan.

- d) **Perumahan dan Permukiman** : Urusan Pemerintah Konkuren yang diselenggarakan di Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Salah satunya adalah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dari 12 Prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memaksimalkan akses masyarakat dalam pelayanan infrastruktur tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu.

Adapun strategi yang ditempuh adalah meningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman formal. Selanjutnya arah kebijakan yang disusun untuk melaksanakan strategi tersebut adalah memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni secara stimulan untuk meningkatkan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Arah Kebijakan tersebut kemudian dilaksanakan melalui Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan Pemukiman, melalui kegiatan pencapaian Rumah tangga miskin yang memiliki Rumah Layak Huni dan pencapaian perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibantu Jalan Lingkungan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program tersebut merupakan prioritas untuk mendukung sektor Perumahan dan permukiman.

2. **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Untuk mendukung agenda Nasional pada Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, maka pada RKPd Kalimantan Timur dituangkan dalam sasaran pembangunan sektoral sebagai berikut :

- a) **Ketahanan Pangan**; Berkaitan dengan prioritas nasional Ketahanan Pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 2 sasaran pembangunan yaitu :
- 1) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas dari 8,06% pada tahun 2016 dan menjadi 10% pada tahun 2018. Adapun strategi yang dirumuskan dalam Tercapainya swasembada beras dari 50% pada tahun 2016 menjadi 85% pada tahun 2018. upaya pencapaian sasaran ini melalui pengembangan agribisnis (Peningkatan

Skala Produksi Pertanian) dengan arah kebijakan peningkatan ekspor produk unggulan daerah dan penguatan mata rantai kawasan agribisnis. Sektor yang sangat berperan dalam pencapaian sasaran diatas adalah sektor Perkebunan dan Perikanan.

- 2) Tercapainya swasembada beras dari 50% pada tahun 2016 menjadi 85% pada tahun 2018. Adapun strategi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian sasaran ini melalui peningkatan produksi pangan dengan 3 arah kebijakan yakni Peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura, Peningkatan produktivitas pertanian dan Peningkatan infrastruktur pertanian.
- b) **Ketahanan Energi** : Untuk mendukung prioritas nasional pemenuhan ketahanan energi yang menjamin ketersediaan energi serta memberikan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau di Kalimantan Timur, Pemerintah provinsi menetapkan sasaran Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dari 1,3% pada tahun 2016 menjadi 1,5% pada tahun 2018 dengan arah kebijakan peningkatan rasio elektrifikasi.
- c) **Kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**: merupakan Kebijakan yang diarahkan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya mewujudkan strategi percepatan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur dengan membuat skema pada :
- 1) Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus dan 3 kawasan industri (KEK Maloy, KIK Kariangau dan Buluminung, Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan Kota Samarinda, Kawasan Berbasis Migas dan Kondesat Kota Bontang, Kawasan Industri Pariwisata Derawan, Kawasan Industri Pertanian Kukar dan Kubar, Kawasan Industri Pertanian PPU dan Paser, dan Kawasan Strategis Perbatasan Mahakam Ulu).
 - 2) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan dengan sasaran pada peningkatan investasi daerah dan penurunan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Program prioritas dalam mendukung sasaran ini ialah dengan target penciptaan wirausaha baru sebanyak 1.000 orang hingga tahun 2018 dan Percepatan dan Pemberian kemudahan dalam proses perizinan usaha yang telah dilakukan dalam satu pintu (PTSP).
 - 3) Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa di Kalimantan Timur dilakukan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat Kalimantan Timur melalui pengendalian tingkat inflasi di Kaltim dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memformulasikan program prioritas yang mengarah kepada terjaganya ketersediaan stok komoditi barang strategis di Kaltim dan peningkatan nilai

tambah produk-produk pertanian dalam arti luas yakni integrasi proses hulu hilir serta dengan meningkatkan ekspor produk olahan di Kaltim.

3. **Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan**, yang terdiri dari: a) Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan; b) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal; c) Pembangunan Perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mendukung agenda Nasional pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, maka pada RKPD Kalimantan Timur dituangkan dalam sasaran pembangunan Indeks Gini Ratio dan pemerataan pembangunan dengan fokus pembangunan pada daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator Makro 3 (tiga) terbawah.

Untuk sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah, yang menjadi focus RKPD 2018 adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah, baik kuantitas maupun kualitasnya, dalam menunjang arus distribusi orang, barang, dan jasa. Pengembangan infrastruktur dalam RKPD 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah perbatasan, pedalaman khususnya Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat. Pembangunan Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat juga dilakukan untuk mendukung upaya untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2018 untuk beberapa indikator utama pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini;

Tabel 4.2
Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran	Tingkat Kemiskinan
1. Samarinda	80,01	3,90	4,06	4,00
2. Balikpapan	78,73	2,14	5,30	2,33
3. Bontang	78,91	6,50	11,06	4,62
4. Berau	76,34	7,00	4,93	4,51
5. Paser	71,31	2,00	7,98	7,86
6. PPU	71,12	4,70	6,01	7,60
7. Kutai Barat	71,21	2,01	6,54	5,00
8. Kutai Timur	72,05	3,76	1,01	6,12
9. Kutai Kartanegara	74,64	5,08	8,93	6,22
10. Mahakam Ulu	66,50	5,00	6,75	7,25

Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-

2019 adalah : “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**” dengan misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan nasional Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai RKP tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target **pertumbuhan ekonomi** sebesar 6,1 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; **Kalimantan sebesar 4,37 persen**; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target **tingkat kemiskinan** sebesar 12,5 persen(*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen; **Kalimantan sebesar 5,40 persen**; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target **tingkat pengangguran** terbuka sebesar 4,44 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; **Kalimantan sebesar 5,10 persen**; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. **Laju inflasi** 3,5 persen.

Dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagai realisasi bentuk pencapaian visi dan misi pembangunan, maka target pembangunan yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 disesuaikan dengan perkembangan dan isu strategis yang berpengaruh dominan dalam pencapaian target tersebut

serta proporsi rasional untuk Provinsi Kalimantan Timur. Adapun target pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Target Pembangunan Nasional dan Kaltim Tahun 2018

NO	Sasaran pembangunan	TARGET NASIONAL UNTUK WILAYAH KALIMANTAN	TARGET RKPD KALTIM 2018
		2018	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,59	0,5 ±1
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,4	6,00
3	Tingkat Pengangguran (%)	5,10	7,00
4	Laju Inflasi (%)	3,5	4 ±1

Dapat dijelaskan untuk target pertumbuhan ekonomi pada RKPD Kalimantan Timur tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,5 ±1%, jauh dari target Nasional untuk wilayah Kalimantan sebesar 3,59%. Hal ini mengingat bahwa 63% pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur bersumber dari komoditas sektor pertambangan penggalian dan industri pengolahan. Harga komoditas sektor ini diperkirakan membaik namun belum cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 1,5%. Berdasarkan hasil kajian Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) bahwa operasionalisasi 8 (delapan) Kawasan Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur mampu mendorong pembangunan sebesar 2,90% sehingga jika harga komoditas bagus dan kawasan tersebut sudah beroperasi diprediksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dapat mencapai angka diatas 4%.

Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur masih berada diatas rata-rata nasional. Penyebab utama dari sulitnya menurunkan tingkat pengangguran ini adalah pandangan bahwa Kalimantan Timur sebagai wilayah yang menjanjikan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat migrasi pencari kerja menjadi tinggi. Permasalahan lainnya adalah struktur pencari kerja dimana 90% yang tidak bekerja adalah lulusan SMA kebawah, sedangkan lowongan pekerjaan yang ada terutama disektor tambang dan penggalian memerlukan tingkat pendidikan SMA atau yang lebih tinggi. Hal lain yang menjadi masalah adalah melemahnya harga komoditas utama Kalimantan Timur yakni batubara sehingga dilakukan pengurangan tenaga kerja.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan

Penetapan prioritas serta target pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 juga mempertimbangkan terhadap evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Bab II, pada beberapa saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, kendala, dan faktor penghambat yang berdampak dalam pencapaian tujuan pembangunan. Demikian juga penelaahan terhadap isu strategis pembangunan baik internal maupun eksternal menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan timur Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Keterkaitan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
dengan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2018

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN 2016	INTER PRETASI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018
1. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	9,24 Kuning	On Track	1) Masih terbatasnya fasilitas (akses pendidikan terutama pada kawasan terdepan, tertinggal, terluar/3T).	Peningkatan pemerataan pelayanan dan fasilitas pendidikan serta manajemen pembangunan pendidikan	1. Peningkatan Kualitas Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	6,11 Kuning	On Track	1) Meningkatnya pemutusan hubungan kerja 2) Belum optimalnya program pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu		2. Percepatan pengentasan kemiskinan
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran	7,95 Merah	Off Track	1) Ketidakesesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia 2) Masih rendahnya minat dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha	Peningkatan Kualitas SDM yang disesuaikan dengan struktur ekonomi daerah dan pasar tenaga kerja	3. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	HIJAU	Melampaui Target	1) Masih tingginya ketergantungan terhadap komoditi strategis dari luar daerah 2) Belum optimalnya peran Pemda dalam mengatasi gejolak pasar 3) Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis	-	4. Pengembangan ekonomi kerakyatan
5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	-0,38 Merah	Off Track	1) Belum optimalnya daya saing investasi 2) Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industri migas 3) Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada	Peningkatan faktor pendukung utama dalam percepatan perwujudan kemandirian ekonomi (Infrastruktur, Energi dan SDM)	5. Percepatan transformasi ekonomi

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN 2016	INTER PRETASI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018
			Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik		
6. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	0,46 Merah	Off Track	1) Masih rendahnya produktifitas dan luas areal sektor pertanian yang ada 2) Berkurang/minimnya jumlah petani	Peningkatan integrasi pembangunan pertanian dari hulu ke hilir (keterpaduan proses produksi dan pemasaran)	6. Pengembangan agribisnis
7. Tercapainya Swasembada Beras	50,00 Kuning	On Track	1) Luas tanam dan luas panen sawah yang belum optimal 2) Masih minimnya; ketersediaan infrastruktur pendukung produksi padi; 3) Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian 4) Belum optimalnya sistem tata niaga padi pasca panen		7. Peningkatan Produksi Beras
8. Meningkatnya Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	1,27 Kuning	On Track	1) Minimnya investor yang membangun energi baru terbarukan di daerah terpencil; 2) Kepadatan penduduk yang tidak merata serta akses sarana prasarana yang tidak memadai menyebabkan lambannya pencapaian Rasio Elektrifikasi di desa-desa.		8. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
9. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar	7 Hijau	Melampaui Target	1) Belum optimalnya konektivitas jaringan transportasi di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra regional) dan antar pusat pelayanan (inter regional)	Perlunya Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah	9. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
10. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	75,00 (baik) Hijau	Melampaui Target	1) Pelayanan publik di beberapa Perangkat Daerah belum maksimal 2) Masih kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat 3) Masih ada anggota masyarakat yang belum paham tentang persamaan hak warga dalam memperoleh pelayanan 4) Berkurangnya APBD yang berimbas pada efisiensi anggaran beberapa program pelayanan publik		11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
11. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	83,19 Hijau	Melampaui Target	1) Masih terjadinya kerusakan kawasan hutan strategis		12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN 2016	INTER PRETASI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018
12. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	1.384 Kuning	On Track	1) Belum adanya rencana aksi dan strategi pelaksanaan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca yang terstruktur di Kabupaten/Kota		

4.2.2. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah. Kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan Program prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2018.
2. Menselaraskan dan mengkonsistenkan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengantisipasi dalam menyelesaikan target-target pembangunan
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2018.
4. Pengembangan sektor-sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Selanjutnya adapun strategi prioritas pembangunan dan program prioritas dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang terintegrasi mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan prioritas pembangunan dengan didukung program prioritas provinsi Kalimantan timur, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Keterkaitan antara Sasaran Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas RKPD Tahun 2018

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018	PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2018
1. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	1. Peningkatan Kualitas Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	1) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2) Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas 3) Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	2. Percepatan pengentasan kemiskinan	4) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
3. Menurunnya Tingkat	3. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	5) Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Pengangguran		Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	4. Pengembangan ekonomi kerakyatan	6) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	5. Percepatan transformasi ekonomi	7) Program Penataan Struktur Industri 8) Program peningkatan kerjasama perdagangan 9) Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan
6. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	6. Pengembangan agribisnis	10) Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 11) Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan 12) Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit
7. Tercapainya Swasembada Beras	7. Peningkatan Produksi Beras	13) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 14) Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 15) Program pengembangan perikanan tangkap 16) Program Peningkatan Produksi Peternakan
8. Meningkatnya Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	8. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	17) Program Pengembangan Ketenagalistrikan
9. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar	9. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	18) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 19) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20) Program Pengendalian Banjir 21) Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan 22) Program pembangunan jalan tol 23) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan 24) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I (Baru) 25) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II (Baru) 26) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III (Baru) 27) Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
10. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	28) Program Peningkatan Pelayanan Publik
11. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	29) Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
12. Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		30) Program Pengelolaan DAS dan RHL (Baru)

4.2.3. Kerangka Indikator Kinerja Pembangunan RKPD tahun 2018

Didalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur diperlukan interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Kalimantan Timur yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Perangkat Daerah di Kalimantan Timur.

Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU Gubernur didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didalam perhitungan indikator Renstra tersebut memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Sasaran pembangunan di Kalimantan Timur yang dijabarkan kedalam sasaran perangkat daerah menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah Kalimantan Timur tahunan.

Untuk menyelaraskan kinerja pembangunan, maka RKPD Kalimantan Timur Tahun 2018 disusun dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial (HTIS). Pendekatan dengan cara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial merupakan pendekatan yang menekankan pada kegiatan-kegiatan untuk mendukung Prioritas Nasional dengan didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini saling keterkaitannya perpaduan antara Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas serta Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dengan mengisyaratkan bahwa Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tema Pembangunan RKPD 2018 dan diprioritaskan untuk pencapaian target dan sasaran Pembangunan Daerah

Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur dan sasaran Pemda Kalimantan Timur, serta sasaran Perangkat Daerah di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Keterkaitan antara Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
dan Program Prioritas serta Indikator Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PD
1	Meningkatnya IPM	Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan						
2	Meningkatnya angka harapan lama sekolah		Peningkatan kompetensi guru	Peningkatan kualitas pendidikan pengajar	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12 Bulan
3	Meningkatnya rata-rata lama sekolah		Peningkatan kesempatan belajar masyarakat	Penuntasan Wajib belajar 12 tahun	2	Program pendidikan menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	80%
					3	Program pendidikan menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	80%
							Angka Partisipasi Murni SMK/MAK	80%

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PD
							Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	80%	
5	Menurunnya tingkat kemiskinan	Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	Peningkatan kualitas infrastruktur tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu	4	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Rumah Tangga miskin yang memiliki Rumah Layak Huni	5946 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
							Jumlah perumahan MBR yang dibantu jalan lingkungan oleh Pemerintah	85 Perumahan	
6	Menurunnya tingkat pengangguran	Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausha)	5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (WUB)	5000	Disperindag kop danUMKM
7	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Strategi 5 : Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis	Peningkatan kerjsama perdagangan dengan pemasok komoditas pangan	6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rasio Ketersediaan stok komoditi pokok dan barang strategis	150%	Disperindag kop danUMKM
8	Meningkatnya daya beli masyarakat		Peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa antar pusat kegiatan nasional (PKN)	Percepatan distribusi arus barang dan jasa komoditas pokok masyarakat	7	Program pembangunan jalan tol	Jumlah jalan tol yang terbangun (Ketersediaan jalan tol (Km))	22 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
9	Menurunnya Indeks Gini								
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Strategi 6 : Percepatan transformasi ekonomi	Peningkatan investasi daerah	Pemangkasan birokrasi proses perijinan usaha	8	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2600 ijin/non ijin	Dinas Penanaman Modal dan KTSP
			Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)	Pengembangan Klaster Industri Konstruksi dan Manufaktur	9	Program Penataan Struktur Industri			
					10	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan investasi industri	20%	Disperindag kop danUMKM
			Peningkatan ekspor produk olahan	Pengembangan Jaringan Perdagangan	11	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	20 Unit Usaha / 100 Milyar	Disperindag kop danUMKM
			Pembangunan prasarana jalan dan prasarana transportasi untuk mendukung kawasan strategis provinsi (KSP) Maloy dan KSP lain	Pengembangan aksesibilitas menuju kawasan strategis provinsi Kalimantan Timur	12	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%) (Panjang jalan untuk mendukung kawasan strategis dengan kapasitas daya mampu diatas 10 Ton)	42,84% (65,54 km)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
					13	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Jumlah fasilitas transportasi darat, laut, udara dan ASDP yang terbangun (2017-2018)	1 pelabuhan maloy & 1 Bandara (BSB)	Dinas Perhubungan
11	Meningkatnya kontribusi sektor	Strategi 7: Pengembang	Peningkatan ekspor produk	Intensifikasi dan Ekstensifikasi	14	Program Perluasan Komoditas	Luas areal komoditas unggulan	150.617 Juta Ha	Dinas Perkebunan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PD
	pertanian dalam arti luas	an agribisnis (Peningkatan Skala Produksi Pertanian)	unggulan daerah	komoditas perkebunan		Perkebunan Non Sawit	perkebunan (Juta Ha)		
							a. Karet	128.740 ha	
							b. Kakao	9.496 ha	
							c. Lada	11.781 ha	
			Peningkatan nilai produksi komoditas perkebunan	15	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan Kelapa sawit	19 Ton/Ha	Dinas Perkebunan	
						Produktivitas komoditas perkebunan karet	1,3 Ton/Ha		
						Produktivitas komoditas perkebunan kelapa	0,68 Ton/Ha		
						Produktivitas komoditas perkebunan kakao	0,77 Ton/Ha		
						Produktivitas komoditas perkebunan lada	1,1 Ton/Ha		
			Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis	Peningkatan nilai tambah produksi hasil perikanan kelautan	16	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya	114.469 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	66.000 ton								
12	Tercapainya swasembada beras	Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan	Peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Produksi Pertanian Padi, palawija dan hortikultura	17	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	Jumlah Produksi Padi (GKG) [Ton]	320.000 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan produktivitas pertanian	Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi daging	19	Program peningkatan produksi peternakan	1. Peningkatan populasi ternak (%)		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							- Sapi (%)	5	
							- Kerbau (%)	3	
							- Kambing (%)	6	
							- Babi (%)	5	
			- Ayam Buras (%)	6					
12. Service per Conception (S/C)	2								
	Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi ikan	20	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	157.734 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan			
13	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan	Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan	Peningkatan rasio elektrifikasi	Peningkatan ketersediaan produksi energi listrik dan jaringan pendukungnya	21	Program Pengembangan ketenagalistrikan	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik	97,50%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
14	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur	Peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana jalan	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan	22	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	PD
	pelayanan infrastruktur dasar	dasar	dan jembatan						Perumahan Rakyat
			Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman dan perbatasan	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan	23	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana jalan	4 Kecamatan an	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat
							Jumlah kecamatan terisolasi yang dapat diakses sarana & prasarana transportasi jalan dan jembatan	0 kecamatan an	
			Peningkatan kapasitas air baku dan air minum	Peningkatan Kualitas dan kapasitas pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan	24	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (l/detik)	700 lt/dt	
							Jumlah debit air baku yang dapat disalurkan	330 L/detik	
							Pengembangan kualitas air baku dan air minum	25	
Pengendalian banjir dan daya rusak air	26	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	415 Ha					
15	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan public	Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerja aparatur	Optimalisasi kinerja aparatur sesuai efisiensi organisasi dan tata laksana	27	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85	Biro Organisasi
16	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja				28	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	Biro Pemerintahan an
17	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan	Strategi 12 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengendalian lahan	Rehabilitasi lahan dan pelestarian kawasan hutan	29	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu	11 DAS	Dinas Kehutanan
18	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		Penurunan emisi gas rumah kaca	Pencegahan dan minimisasi pelepasan emisi gas rumah kaca sektor lahan, energi dan limbah	30	Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim	Jumlah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca	1317 ton CO2 eq/1 Juta US\$	Dinas Lingkungan Hidup